

**SKRIPSI**

***REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP  
(RCEP) DALAM TINJAUAN KOLONIALISME BARU  
DAN PENGARUHNYA BAGI INDONESIA***



**KURNIA ILAHI**

**F0220002**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**MAJENE**

**2024**

## ABSTRAK

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) adalah perjanjian perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Perjanjian ini melibatkan sepertiga dari populasi dunia dan sekitar tiga puluh persen (30%). RCEP yang terdiri dari negara maju dan berkembang berpotensi menjadi jalan dominasi negara-negara besar. Indonesia, sebagai negara dengan perekonomian terbesar di ASEAN, berada di persimpangan yang krusial dalam konteks RCEP. Ada kekhawatiran bahwa RCEP bisa menjadi alat untuk mendominasi negara-negara berkembang, merampas kedaulatan ekonomi mereka, dan menciptakan bentuk baru dari neokolonialisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi kedaulatan Indonesia dalam konteks kerja sama RCEP sebagai potensi bentuk kolonialisme baru. Dengan menggunakan teori dependensi dan neokolonialisme, penelitian ini akan menyelidiki dampak RCEP terhadap Indonesia dan apakah perjanjian ini mempengaruhi kedaulatan ekonomi negara ini. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dan menggunakan metode analisis data kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari internet dan dokumen terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa RCEP mencerminkan bentuk kolonialisme baru di dalamnya. Kerja sama yang di dalamnya adalah negara maju dan negara berkembang menimbulkan adanya dependensi. Indonesia sebagai negara berkembang mengalami ketergantungan dalam sektor perdagangan, investasi dan teknologi terhadap negara-negara besar seperti China. Hal ini kemudian mengancam kedaulatan Indonesia.

**Kata Kunci :** Dependensi, Indonesia, Neokolonialisme, RCEP

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Banyak negara juga telah melakukan upaya kolaboratif untuk mencapai perdagangan internasional yang bebas dan mudah, termasuk Indonesia. Indonesia telah melakukan hubungan perdagangan dengan negara-negara lain, baik di kawasan Asia Tenggara, di Asia, maupun dengan negara mitra lain di kawasan. Saat ini Indonesia telah menandatangani perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) untuk merespon dinamika perubahan ekonomi dunia.<sup>1</sup>

RCEP merupakan perjanjian perdagangan multilateral yang disepakati oleh lima belas negara di kawasan Asia Pasifik. Negara-negara anggota RCEP yaitu sepuluh negara anggota *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) yang terdiri dari Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam serta lima negara mitra ASEAN yang terdiri dari Australia, China, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru. Perjanjian ini diratifikasi pada 15 November 2020 setelah melewati proses yang cukup panjang. RCEP disepakati dan

---

<sup>1</sup> Haryo Limanseto. (2021). *Pemanfaatan Perjanjian RCEP untuk Peningkatan Daya Saing dan Menarik Investasi*. Diakses dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3574/pemanfaatan-perjanjian-rcep-untuk-peningkatan-daya-saing-dan-menarik-investasi> pada tanggal 10 Oktober 2023 pukul 09.15 WITA

ditandatangani oleh seluruh anggota yang digelar secara online dengan Vietnam sebagai tuan rumah.<sup>2</sup>

Indonesia adalah negara yang pertama kali mengusulkan RCEP pada saat memimpin ASEAN pada tahun 2011. Di bawah pimpinan Imam Pambago, Direktur Jenderal Perundingan Perjanjian Internasional Kementerian Perdagangan, dengan dukungan dari Sekretariat ASEAN, negosiasi dimulai pada tahun 2013. Tujuan kerja sama ini adalah untuk menggabungkan lima perjanjian perdagangan bebas yang sudah dimiliki ASEAN dengan enam mitra dagangnya. Namun di akhir perundingan India memilih untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut.<sup>3</sup>

Perjanjian RCEP merupakan kelanjutan dari perjanjian perdagangan multilateral di kawasan Asia-Pasifik. Dengan partisipasi lima belas negara yang mewakili hampir sepertiga populasi dunia, RCEP menjadi platform perdagangan yang strategis. Hal ini semakin memperkuat posisi Asia, khususnya Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global. Dengan potensi pasar yang besar, RCEP dapat meningkatkan arus perdagangan barang, jasa dan investasi di kawasan ini.<sup>4</sup> Namun di balik potensi manfaatnya, terdapat juga tantangan yang mungkin dihadapi negara-

---

<sup>2</sup> FTACenter.(2023). *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Diakses dari <https://ftacenter.kemendag.go.id/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep#:~:text=Pada%20November%202020%2C%20perjanjian,dengan%20Vietnam%20sebagai%20tuan%20rumah> pada 1 September 2023 pukul 09.35 WITA

<sup>3</sup> Mochamad Rifki Maulana. (2021). *Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) Dan Pengaruhnya Untuk Indonesia*. Vol. 5 No. 1, hlm. 118

<sup>4</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). *Pemanfaatan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) untuk Peningkatan Perdagangan dengan Lima Negara RCEP Non-ASEAN*

negara anggota RCEP, terutama dalam menghadapi persaingan dari negara-negara besar dalam perjanjian itu.

Kolonialisme telah lama diartikan sebagai dominasi teritorial negara-negara Barat terhadap negara lain. Namun di era globalisasi saat ini, bentuk dominasi tersebut telah berubah. Neo-kolonialisme menekankan pengaruh ekonomi dan politik daripada kolonisasi langsung. Negara-negara besar sering mengontrol kebijakan ekonomi negara-negara berkembang melalui lembaga keuangan seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank*. Perjanjian perdagangan bebas juga menjadi salah alat baru kolonialisme yang sering kali membuat negara-negara maju memperoleh keuntungan yang lebih besar.<sup>5</sup>

RCEP yang terdiri dari negara maju dan berkembang berpotensi menjadi jalan dominasi negara-negara besar. Negara dengan kekuatan ekonomi besar mempunyai kepentingan strategis dalam kesepakatan tersebut dan dapat mengeksploitasi posisi mereka untuk memaksimalkan keuntungan. Hal tersebut menjadi pertanyaan, apakah RCEP benar-benar membawa keuntungan bagi seluruh anggotanya atau hanya memperkuat dominasi negara-negara besar di kawasan.

Negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Asia, yaitu China, menjadi negara dengan posisi tawar yang kuat dalam RCEP. Kepentingan China dalam integrasi ekonomi regional ini jelas untuk mendukung

---

<sup>5</sup> Britanica. *Neocolonialism*. Diakses dari <https://www.britannica.com/topic/neocolonialism> pada 5 September 2023 pukul 10.12 WITA

kepentingan nasionalnya. RCEP membantu China untuk menghadapi perang dagang dengan Amerika Serikat. Dalam hal ini China mendapat peluang untuk memperkuat pengaruh ekonominya di kawasan Asia-Pasifik.<sup>6</sup>

Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di ASEAN, Indonesia berada di persimpangan jalan dalam perjanjian RCEP. Pada satu sisi, akses pasar yang lebih besar dapat mendorong ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun di sisi yang lain, persaingan dengan negara maju serta peningkatan impor dapat memberikan tekanan pada sektor ekonomi dalam negeri. Dampak RCEP tidak hanya terbatas pada perekonomian, tetapi juga pada aspek sosial seperti masalah ketenagakerjaan dan dampak politik seperti kedaulatan negara juga menjadi pertimbangan penting bagi Indonesia.

Dalam perjanjian RCEP, tidak selalu tentang keuntungan yang didapatkan. Ketentuan liberalisasi yang ada dalam perjanjian itu akan menyulitkan negara-negara ASEAN. Selain itu, perdagangan bebas yang membuat tarif berkurang seminimal mungkin akan membuat pasokan global semakin berkembang. Kekhawatiran lain yaitu impor barang luar, terkhususnya China. Indonesia berpeluang banjir barang impor dari China. Dengan begitu pengambilan kebijakan bisa dengan mudah di pengaruhi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Ferdy Pratama, dkk. (2022). *Motif dan Kepentingan China dalam Pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol. 6. No.1 hlm 1833

<sup>7</sup> Mochamad Rifki Maulana. (2021). *Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) Dan Pengaruhnya Untuk Indonesia*. Vol. 5 No. 1, hlm 124

Banyak literatur yang membahas pendekatan RCEP dalam perspektif makroekonomi. Namun analisis mengenai dinamika kekuasaan dan dampak neo-kolonialisme, khususnya terhadap Indonesia kurang terfokus. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan analisis yang lebih luas dan mendalam mengenai pengaruh RCEP terhadap struktur kekuasaan di kawasan ini dan dampaknya terhadap Indonesia. Selain itu, pengaruh RCEP terhadap Indonesia ini penting untuk dianalisis dikarenakan Indonesia sebagai negara yang menjadi inisiator perjanjian ini.

## **1.2 Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Batasan Masalah**

Dalam konteks kerja sama RCEP yang mencakup berbagai negara di kawasan Asia-Pasifik, terdapat dinamika yang mencerminkan unsur neo-kolonialisme. Faktor-faktor seperti dominasi negara-negara kuat, hubungan eksploitatif, dan ketergantungan ekonomi yang mungkin ada di antara negara dalam perjanjian dapat berdampak pada kedaulatan Indonesia. Kedaulatan yang dimaksud adalah kebebasan dalam menentukan kebijakan ekonomi politik dan perdagangan. Namun adanya hubungan eksploitatif dapat mempengaruhi posisi kedaulatan negara. Dalam hal ini Indonesia, menjadi rentan terhadap pengaruh luar. Penelitian ini akan terbatas pada periode waktu yang relevan, yaitu sejak penandatanganan RCEP pada tahun 2020 hingga tahun 2023.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang dan batasan masalah sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah “Bagaimana posisi kedaulatan Indonesia dalam konteks kerja sama RCEP tahun 2020-2023?”

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui posisi kedaulatan Indonesia dalam konteks kerja sama RCEP 2020-2023.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### 1 . Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat seperti wawasan bagi mahasiswa program studi ilmu hubungan internasional mengenai RCEP dan kolonialisme baru sehingga dapat menambah referensi penelitian dan sumber bacaan.

#### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan keterampilan penulis dalam penulisan skripsi terkhusus mengenai RCEP dan kolonialisme baru serta pengaruhnya bagi Indonesia.



## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif . Penelitian deskriptif memberikan gambaran obyektif mengenai suatu peristiwa atau fenomena dengan menyajikan data faktual kemudian menarik kesimpulan secara rinci mengenai suatu permasalahan, peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti. Tipe penelitian ini berfungsi untuk melukiskan dan menggambarkan sebuah fenomena yang telah atau sedang terjadi berdasarkan keadaan fakta empiris disertai argumen yang relevan.<sup>8</sup> Pendekatan ini nantinya akan menggambarkan kondisi terkait perjanjian RCEP. Sehingga dalam penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan, mengurai, dan menganalisis fakta terkait posisi Indonesia dalam perjanjian ini.

### **1.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang dapat berupa fakta, data, gejala, atau informasi faktual yang dapat dipercaya dan relevan dengan kenyataan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. *Internet based research*, yaitu cara mendapatkan referensi atau bahan penelitian dengan mengumpulkan data-data dan informasi dari internet.

---

<sup>8</sup> Haryono, E. & Ilkodar, S. B (2009). *Menulis Skripsi Panduan Untuk Mahasiswa Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Hal. 86

2. *Dokumen based research*, yaitu cara mendapatkan bahan penelitian dengan mengumpulkan data-data dari dokumen terkait.

### **1.4.3 Jenis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dipublikasikan sebelumnya atau berasal dari penelitian yang telah dipelajari sebelumnya oleh peneliti. Kuncoro mengartikan data sekunder adalah data yang didapatkan oleh pihak lain yang sesuai dengan data yang dicari peneliti.<sup>9</sup> Data dikumpulkan dengan menggunakan metode tinjauan pustaka. Data tersebut diambil dari kutipan laporan nasional, artikel surat kabar, majalah, tesis, surat kabar cetak dan dokumen lain yang relevan.

### **1.4.4 Analisis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif biasanya lebih bersifat deskriptif dengan berlandaskan teori. David Williams mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah usaha yang dilakukan peneliti mengumpulkan data berdasarkan latar belakang alamiah. Tentunya karena dilakukan secara alami, maka hasil penelitiannya juga bersifat ilmiah dan dapat dijadikan bahan pertimbangan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Depublish store. (2023). *Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data, dan Contoh di Penelitian*. Diakses dari <https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian/> pada 1 Oktober 2023 pukul 17.25 WITA

<sup>10</sup> Depublish Store. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Definisi, Jenis, Karakteristiknya*. Diakses dari <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/> pada 1 Oktober 2023 pada 1 Oktober 2023 pukul 17.30 WITA

#### **1.4.5 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada Februari hingga Mei 2024 yang berpusat di perpustakaan Universitas Sulawesi Barat dan perpustakaan Fisip. Ada juga data yang di dapatkan dari website atau berita online yang sesuai dengan penelitian dan penambah referensi.

#### **1.5 Sistematika Penyusunan Skripsi**

Bab I : pada bagian ini berisi latar belakang, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penyusunan skripsi.

Bab II : pada bagian ini berisi kajian teori dan telaah pustaka yang digunakan dalam penelitian. Teori yang digunakan adalah teori dependensi dan neokolonialisme.

Bab III : pada bagian ini memuat tentang penjelasan umum mengenai RCEP dalam kerangka global dan implementasi RCEP di Indonesia.

Bab IV : pada bagian ini berisi pembahasan dan analisis tentang posisi kedaulatan Indonesia dalam konteks kerja sama RCEP dengan menggunakan teori dependensi dan neokolonialisme.

Bab V : pada bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

## BAB II

### TELAAH TEORITIK DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### 2. Telaah Teoritik

##### 2.1.1 Dependensi

Teori dependensi adalah kritik terhadap asumsi pada masa permulaan perang dingin yang melihat bahwa negara-negara yang berada dalam sistem internasional akan diuntungkan dalam pembangunan ekonomi. Namun faktanya, suatu negara yang memiliki kesejahteraan ekonomi dapat menyebabkan ketertinggalan ekonomi bagi negara lain. Kondisi ini membagi negara menjadi dua bagian, yaitu *core* (negara maju) dan *periphery* (negara berkembang). Teori ini menjelaskan bahwa bagi negara berkembang atau *periphery* secara ekonomis pembangunan adalah menghasilkan keterbelakangan, secara sosial menambah tingkat kesenjangan sosial lalu menciptakan konflik, dan secara politis adalah menguatkan kedudukan pemerintahan yang otoriter.<sup>11</sup>

Teori ketergantungan muncul sebagai respon terhadap pertumbuhan yang tidak merata dan peningkatan kesenjangan yang terjadi diantara negara maju dan negara berkembang. Dalam sudut pandang ekonomi pasca-kolonial, banyak negara-negara yang baru merdeka terjebak dalam situasi ketergantungan ekonomi yang membuat mereka

---

<sup>11</sup> Faustina Auria., Serafica Gischa. (2023). *Teori Ketergantungan dalam Hubungan Internasional*. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/23/140000769/teori-ketergantungan-dalam-hubungan-internasional?page=all> pada 25 September 2023

bergantung pada negara-negara maju. Teori ketergantungan mencoba menjelaskan dinamika ini, dengan alasan bahwa keberadaan negara-negara miskin dan terbelakang tidak hanya disebabkan oleh kegagalan internal mereka sendiri, namun juga karena interaksi mereka dalam sistem ekonomi global.

Terdapat asumsi utama yang selalu dihadirkan teori dependensi. *Pertama*, tidak seperti pembangunan mandiri di negara-negara pusat, pembangunan di negara-negara pinggiran memerlukan hubungan yang saling bergantung dengan negara-negara pusat. *Kedua*, negara-negara berkembang akan mengalami pertumbuhan ekonomi terbesar ketika hubungan mereka dengan negara-negara inti melemah. *Ketiga*, ketika negara pusat berhasil lolos dari krisis dan melanjutkan kembali hubungan investasi dan perdagangan, negara tersebut secara langsung akan mengintegrasikan kembali negara-negara pinggiran ke dalam sistem ketergantungan, sehingga menghambat pembangunan industrialisasi di kawasan.<sup>12</sup>

Ketergantungan merupakan suatu kondisi dimana kehidupan perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian negara lain. Interaksi yang terjalin antara negara maju dan negara berkembang merupakan interaksi yang tidak sehat karena negara maju mengeksploitasi sumber daya negara berkembang untuk

---

<sup>12</sup> Agung Prija Utama. Implementasi *Teori Dependensi Studi Kasus : Kebijakan Belt And Road Initiative Tiongkok Khususnya Di Kawasan Afrika Timur*. Vol. 3 No.2, hlm 53-54

kepentingan pembangunan negaranya sendiri.<sup>13</sup> Terdapat tiga dependensi negara berkembang akibat perluasan modal dan pasar yang dilakukan negara maju. Bentuk dependensi tersebut yaitu ketergantungan kolonial, ketergantungan industri-finansial, dan ketergantungan industri-teknologi.

#### 1. Ketergantungan Kolonial

Negara bagian pusat mengatur kebijakan politik negara-negara pinggiran, meskipun negara-negara bagian tersebut secara hukum independen. Keputusan politik di negara berkembang seringkali dipengaruhi oleh keinginan negara maju. Intervensi negara maju terjadi karena pengaruh investornya di negara berkembang. Kepentingan investasi negara-negara maju seringkali mendominasi kebijakan negara-negara berkembang. Negara-negara pinggiran cenderung memiliki legitimasi kedaulatan yang terbatas dalam kerja sama pembangunan.

#### 2. Ketergantungan finansial dan industri

Negara pusat mengontrol keuangan negara-negara pinggiran, bahkan ketika negara-negara tersebut independen secara hukum. Investasi asing yang diberikan negara maju kepada negara berkembang seringkali mendominasi modal dalam negeri. Industrialisasi di negara-negara berkembang cenderung didorong oleh investor asing. Pekerja lokal seringkali menerima upah lebih rendah dibandingkan pekerja asing yang direkrut oleh investor

---

<sup>13</sup> Syed Agung Afandi, Muslim Afandi dan Rizki Erdayani. (2022). *Pengantar Teori Pembangunan*. (CV. Bintang Semesta Media). Hlm. 31

asing. Konsumsi barang mewah dari negara maju semakin mendominasi, meski rata-rata pendapatan negara berkembang lebih rendah.

### 3. Ketergantungan antara industri dan teknologi

Banyak industri lokal di negara-negara satelit didirikan oleh pengusaha lokal namun teknologinya dikuasai oleh negara pusat. Teknologi industri seringkali diimpor dari negara-negara pusat sehingga menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan pada teknologi memperlambat kemajuan negara-negara berkembang. Kontrol pusat atas teknologi dapat mengarah pada monopoli surplus industri. Tanpa inovasi lokal, negara-negara periferi akan tetap bergantung pada impor teknologi dari negara-negara inti.

Teori ketergantungan mengemukakan bahwa negara-negara berkembang bergantung pada negara-negara maju dalam hal perdagangan, teknologi, dan investasi. Negara-negara maju dianggap memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar, sehingga dapat memanipulasi ekonomi dunia sesuai kepentingan mereka sendiri. Negara-negara berkembang selalu menjadi penghasil bahan mentah dan sumber daya alam, sedangkan negara maju menjadi penghasil produk. Negara-negara

berkembang dianggap terjebak dalam peran ini karena kebutuhan ekonomi negara maju terus meningkat.<sup>14</sup>

Tiga faktor utama menyebabkan kesulitan bagi negara-negara pinggiran untuk mengembangkan ekonomi mereka.<sup>15</sup> Menurut teori dependensi, penyebabnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Pemisahan tenaga kerja

Pemisahan tenaga kerja Teori ini menyatakan bahwa penyebab pertama adalah pembagian tenaga kerja di seluruh dunia. Negara inti dan negara sekitarnya memiliki dominasi teknologi. Negara-negara sekitar membantu ekonomi negara inti. Namun, ekonomi yang bekerja untuk mengekstraksi sumber daya alam, ekonomi pertanian, dan tenaga kerja murah didominasi oleh negara-negara pusat pinggiran dan negara yang paling terpinggir. Negara-negara pusat pinggiran juga membantu ekonomi negara inti dan negara-negara sekitarnya. Ekonomi negara-negara yang paling bawah bergantung pada negara-negara yang lebih kaya, dan setiap negara terpinggir berkontribusi pada kepentingan negara-negara yang lebih kaya.

---

<sup>14</sup> Tri Bagus Prabowo, Rezya Agnesica Sihaloho. Analisis Ketergantungan Indonesia pada Teknologi Asing dalam Sektor Energi dan Dampaknya pada Keamanan Nasional. Jurnal Lemhannas RI. Vol.11 No.1. Hlm 74

<sup>15</sup> Kompas.com. 2022. *Teori Ketergantungan Dalam Hubungan Internasional*. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/23/140000769/teori-ketergantungan-dalam-hubungan-internasional?page=all>



## 2. Pembagian kelas

Para ahli teori ketergantungan mengusulkan penyebab kedua, yaitu pembagian kelas. Negara-negara di dunia dibagi berdasarkan seberapa kaya mereka. Baik negara kaya maupun miskin bekerja sama untuk mempertahankan kekuasaan dan meningkatkan kekayaan mereka. Akibatnya, negara kaya akan berusaha untuk mempertahankan sistem yang menguntungkan mereka.

## 3. Kapitalisme global

Penyebab ketiga menunjukkan bahwa setiap masyarakat termasuk dalam sistem global yang lebih besar, yang disebut kapitalisme global. Sistem ekonomi liberal yang didirikan oleh negara-negara inti terdiri dari bidang perdagangan dan keuangan. Bank dan perusahaan multinasional membantu orang kaya di negara inti. Selain itu, baik Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional (IMF) bekerja untuk memenuhi kebutuhan negara-negara inti dan individu-individu sentral kapitalisme. Justru, sistem ini mendukung eksploitasi negara-negara terpinggir daripada memberikan mereka pembangunan atau kesempatan yang sama.

### **2.1.2 Neokolonialisme**

Kolonialisme baru atau disebut juga neokolonialisme adalah suatu konsep yang menekankan bahwa negara-negara bekas jajahan meskipun sudah merdeka, mereka tetap berada di bawah dominasi negara besar atau

negara industri maju lainnya baik dari segi ekonomi, politik dan budaya.<sup>16</sup> Neokolonialisme menurut Soekarno akan melakukan aksi sosial yang akan membuat negara jajahan tidak mampu berkembang. Selama negara jajahan masih terikat dengan negara penjajah, maka segala sesuatu yang dilakukan bukan untuk negara sendiri tetapi juga untuk kepentingan negara lain, bahkan dapat merugikan untuk negara kita sendiri.<sup>17</sup>

Berdasarkan sejarahnya, kolonialisme tercipta dari keinginan kuat negara-negara besar untuk memperluas pengaruh dan kekayaannya melalui penguasaan langsung terhadap wilayah lain. Namun ketika banyak negara koloni mulai merdeka, penjajahan tidak sepenuhnya berakhir. Mereka hanya bertransformasi menjadi bentuk yang lebih halus dan modern. Meskipun negara-negara bekas jajahan telah merdeka secara politik, mereka masih sering terjebak dalam jaringan ketergantungan ekonomi dan politik pada negara maju.

Hal ini berbeda dari masa kolonial yang tidak lagi diperoleh melalui kekuatan militer. Sebagai gantinya, penjajahan dijalankan melalui instrumen ekonomi seperti investasi asing langsung, kehadiran perusahaan multinasional, dan kebijakan utang yang mengikat negara-negara berkembang. Organisasi perdagangan internasional dan lembaga keuangan sering menjadi alat untuk negara maju dalam mempertahankan pengaruh

---

<sup>16</sup> Internet Encyclopedia of Philosophy. *Neocolonialism*. Diakses dari <https://iep.utm.edu/neocolon/> pada 20 September 2023 pukul 17.10 WITA

<sup>17</sup> DosenSosiologi.com. (2023). *Pengertian Neokolonialisme, Macam, Tujuan, Dampak dan Contohnya*. Diakses dari <https://dosensosiologi.com/pengertian-neokolonialisme/> pada 1 Oktober 2023 pukul 17.18 WITA

mereka.<sup>18</sup> Ketergantungan ini membuat negara-negara berkembang terperangkap dalam siklus utang dan ketergantungan teknologi yang sulit diatasi.

Selain kontrol ekonomi, neokolonialisme juga mencerminkan dominasi budaya dan Informasi. Dengan adanya globalisasi media, norma dan nilai dari negara-negara Barat telah menjadi dominan, seringkali mengancam dan menyamarkan keragaman budaya lokal. Hal ini bisa berujung pada homogenisasi budaya dan kehilangan identitas nasional.

Penyebab munculnya neokolonialisme dapat dijelaskan oleh beberapa faktor utama. Pertama, nasionalisme populer di kalangan banyak kelas sosial, mendorong terbentuknya kelompok pendukung negara yang menginginkan kemerdekaan, serta deklarasi kemerdekaan yang diakui negara lain. Faktor kedua adalah globalisasi, yaitu upaya membakukan penampilan setiap orang di dunia dalam hal komunikasi, perilaku, dan budaya. Hal ini memungkinkan neokolonialisme tumbuh dan mempengaruhi negara-negara lain, terutama melalui perubahan ke arah gaya hidup yang lebih konsumtif, sehingga menguntungkan negara-negara yang kuat sebagai pusat industri. Akibatnya, negara-negara berkembang menjadi lebih bergantung.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Kwame Nkrumah. (1965). *Neo-colonialism The Last Stage of Imperealism*. (London: Thomas Nelson & Sons, Ltd). Hlm. 188

<sup>19</sup> Miftakhuddin.(2019). *Kolonialisme Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni*. Sukabumi: CV Jejak. Hlm 116-117

Neoliberalisme dan globalisasi merupakan bentuk neokolonialisme, yang merupakan praktik ekonomi dan politik yang digunakan untuk mengontrol sebuah negara tanpa perlu mengirim tentara sebagai pengganti kontrol militer langsung. Globalisasi pada dasarnya berpijak pada kebangkitan kembali liberalism (neoliberalisme).<sup>20</sup> Neoliberalisme dan globalisasi membentuk struktur neokolonialisme yang berpangkalan dari desa hingga ke level global, dan bersilang-sengkarut dari lembaga keuangan dan perdagangan internasional.<sup>21</sup>

Esensi dari neokolonialisme adalah bahwa negara yang menjadi subjeknya, secara teori, adalah negara yang independen dan memiliki segala ciri kedaulatan internasional. Pada kenyataannya sistem ekonomi dan kebijakan politiknya diarahkan dari luar. Cara dan bentuk arahan ini bisa bermacam-macam bentuknya. Misalnya, dalam kasus yang ekstrim, pasukan kekuasaan kekaisaran dapat menempatkan pasukannya di wilayah negara neokolonial dan mengendalikan pemerintahan negara tersebut.<sup>22</sup>

Negara neokolonial mungkin diwajibkan untuk mengambil produk-produk yang diproduksi oleh kekuatan imperialis dengan mengecualikan produk-produk pesaing dari negara lain. Kendali atas kebijakan pemerintah di Negara neokolonial dapat dijamin dengan pembayaran biaya

---

<sup>20</sup>

<https://mirror.unpad.ac.id/orari/library/cd-al-manaar-digilib/bahan/8.%20EKONOMI%20POLITIK/3.%20Neoliberalisme%20dan%20Globalisasi.pdf>  
pada

<sup>21</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme>

<sup>22</sup> Nkrumah, K. 1966. *Neo-colonialism The Last Stage of Imperealism*. London: Thomas Nelson & Sons, Ltd.

menjalankan negara, dengan menyediakan pegawai negeri sipil pada posisi-posisi yang dapat menentukan kebijakan, dan dengan pengendalian moneter atas mata uang asing melalui penerapan sistem perbankan.<sup>23</sup>

Neokolonialisme juga merupakan bentuk imperialisme yang paling buruk. Bagi yang mempraktekannya berarti kekuasaan tanpa tanggung jawab dan bagi yang menderita berarti eksploitasi tanpa ganti rugi. Yang terpenting, neokolonialisme, seperti halnya kolonialisme sebelumnya, menunda penyelesaian masalah-masalah sosial yang harus dihadapi oleh sektor-sektor yang sudah berkembang sepenuhnya di dunia sebelum bahaya perang dunia dapat dihilangkan atau masalah kemiskinan dunia dapat diselesaikan.<sup>24</sup>

## 2.2 Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti tentunya telah melakukan penelusuran terhadap beberapa referensi terkait RCEP dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Referensi tersebut dijadikan sebagai bahan acuan maupun pembandingan berupa artikel, jurnal, skripsi dan buku-buku terkait.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Gabriela Putri dengan Judul **Analisis Dampak *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* Terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2020-2022**. Penelitian ini berfokus menganalisis RCEP dalam perekonomian Indonesia pada tahun 2020-2022. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa kerjasama RCEP memperluas dan

---

<sup>23</sup> ibid

<sup>24</sup> ibid

memperdalam ekonomi negara di kawasan tersebut termasuk Indonesia dengan memberikan peluang dalam akses bisnis.<sup>25</sup>

Skripsi oleh Gabriela putri ini di jadikan sebagai telaah pustaka di karenakan memiliki kesamaan yaitu membahas tentang RCEP bagi Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa RCEP memperdalam integrasi ekonomi kawasan, termasuk Indonesia. RCEP telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia pada periode waktu tertentu. Ini bisa menjadi dasar yang kuat untuk membandingkan dampak ekonomi langsung dari RCEP dengan dampak yang lebih luas dari kolonialisme baru.

Kedua, artikel jurnal dengan judul **Perjanjian Kemitaraan Ekonomi Komprehensif Regional (*Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP*) dan Pengaruhnya Untuk Indonesia** yang ditulis oleh Mochamad Rifki Maulana pada tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada isi dari perjanjian RCEP secara umum dan pengaruhnya untuk Indonesia. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia menggagas perjanjian RCEP yang membuka peluang berskala besar bagi Indonesia sebagai upaya untuk memperluas akses ke perdagangan internasional dan menaikkan pendapatan negara.<sup>26</sup>

Artikel di atas dijadikan telaah pustaka karena menyediakan pandangan komprehensif mengenai isu perjanjian RCEP dan bagaimana Indonesia terlibat di

---

<sup>25</sup> Gabriela Putri. (2023). *Analisis Dampak Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2020-2022*. Universitas Islam Indonesia.

<sup>26</sup> Mochamad Rifki Maulana. (2021). *Perjanjian Kemitaraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) Dan Pengaruhnya Untuk Indonesia*. Vol. 5 No. 1, hlm. 118

dalamnya. Artikel ini menyoroti bahwa pemerintah Indonesia melihat RCEP sebagai peluang untuk meningkatkan posisinya dalam konteks perdagangan internasional. Hal tersebut dapat memberikan wawasan tentang bagaimana Indonesia melihat dirinya dalam kerangka kolonialisme baru dan bagaimana RECP mempengaruhi perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi lainnya. Hal tersebut memberikan dasar bagi peneliti untuk menganalisis bagaimana perubahan tersebut mencerminkan, memperkuat, atau menantang dinamika kolonialisme baru.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Yunarwanto dengan judul **Dampak Keikutsertaan Indonesia di Dalam RCEP Terhadap Volume Perdagangan - Bukti Dari Gravity Model**. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak volume perdagangan Indonesia sebagai anggota RCEP. Hasilnya menunjukkan bahwa PDB dan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap perdagangan, sedangkan jarak mempunyai korelasi negatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa 49,98% model gravitasi dapat menjelaskan perdagangan endogen, sementara sebesar 50,02% sisanya bisa dijelaskan oleh faktor di luar model. Faktor-faktor tersebut adalah peningkatan efisiensi logistik peningkatan efisiensi kelembagaan, peningkatan persepsi korupsi, kejelasan dan konsistensi aturan main, serta kejelasan hukum.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Yunarwanto. (2019). *Dampak Keikutsertaan Indonesia di dalam Regional Comprehensive Economic Partnership terhadap Volume Perdagangan-Bukti Gravity Model*. Kajian Ekonomi dan Keuangan. Vol.3, 151

Artikel diatas dijadikan telaah pustaka karena menyajikan analisis empiris terhadap dampak keikutserataan Indonesia dalam perjanjian RCEP terhadap volume perdagangan. Dengan menggunakan model gravity, analisis tersebut menunjukkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perdagangan bilateral. Dalam konteks kolonialisme baru, pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan bisa membantu mengidentifikasi apakah ada kecenderungan dominasi atau ketergantungan tertentu dari negara tertentu dalam RCEP terhadap Indonesia.

Beberapa referensi diatas merupakan telaah pustaka yang nantinya akan membantu peneliti. Telaah pustaka yang dijabarkan memiliki fokus tersendiri dalam mengkaji RCEP dan dampak atau pengaruhnya terhadap Indonesia. Masing-masing penelitian juga memiliki metode dan teori tersendiri sesuai dengan kebutuhan penelitian. Namun penelitian ini, peneliti akan menambahkan aspek atau sudut pandang baru yaitu mengkaji RCEP dalam bentuk kolonialisme baru. Penelitian ini akan menganalisis serta posisi Indonesia dalam keanggotaannya di RCEP.



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM RCEP**

#### **3.1 RCEP dan Pengaturannya**

RCEP adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) di kawasan Asia Pasifik. Perjanjian ini diikuti oleh 15 negara yang terdiri dari 10 negara anggota *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam serta 5 negara mitra ASEAN yang terdiri dari Australia, China, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru. Perjanjian ini diratifikasi dan ditandatangani oleh seluruh anggota pada tanggal 15 November 2020 yang digelar secara online dengan Vietnam sebagai tuan rumah.<sup>28</sup>

Awalnya RCEP digagas dan diusulkan oleh Indonesia pada tahun 2011 pada saat Indonesia menjabat sebagai ketua ASEAN. Indonesia kemudian ditunjuk sebagai koordinator sekaligus memimpin Komite Perundingan Perdagangan RCEP yang membawahi 16 negara, yaitu 10 negara anggota ASEAN serta Australia, India, Jepang, Korea, China, dan Selandia Baru. Pada tahun 2012, ASEAN bersama dengan 6 mitranya tersebut mulai menyetujui gagasan perjanjian

---

<sup>28</sup> FTACenter.(2023). *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Diakses dari <https://ftacenter.kemendag.go.id/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep#:~:text=Pada%2015%20November%202020%2C%20perjanjian,dengan%20Vietnam%20sebagi%20tuan%20rumah> pada 10 Januari 2024 pukul 09.35 WITA

tersebut. Perundingan pertama RCEP saat itu dilakukan di Phnom Penh, Kamboja dengan fokus pembahasan isu-isu perdagangan barang, jasa, dan investasi.<sup>29</sup>

Proses negosiasi RCEP terus berlanjut pada awal tahun 2013 dengan Indonesia sebagai koordinator perundingan RCEP *Trade Negotiating Committee* (TNC). Selama 8 tahun RCEP telah melalui 28 putaran perundingan reguler, 13 pertemuan tingkat menteri, dan 3 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Para kepala negara dan kepala pemerintahan negara anggota mulai mengumumkan selasainya seluruh teks perjanjian RCEP pada pertemuan tanggal 4 November 2019. Akan tetapi, India tidak ikut serta dalam pengumuman tersebut. Pada KTT ASEAN ke-37 tahun 2020, perjanjian RCEP berhasil disepakati dan ditandatangani oleh seluruh anggota.<sup>30</sup>

RCEP adalah sebuah inisiatif perdagangan besar yang diusulkan oleh ASEAN untuk meningkatkan perdagangan antara negara-negara anggotanya dan mitra perjanjian perdagangan bebas. Secara kolektif, kelima belas negara penandatangan RCEP mewakili 29,6% populasi dunia, 30,2% *Gross Domestic Product* (GDP) global, 27,4% perdagangan global, dan 29,8% *Foreign Direct Investment* (FDI) global. Meskipun India memutuskan untuk tidak bergabung,

---

<sup>29</sup> Gabriela Putri. (2023). *Analisis Dampak Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2020-2022*. Universitas Islam Indonesia. Hlm 15-20

<sup>30</sup> *ibid*

RCEP tetap menjadi perjanjian perdagangan terbesar di dunia di luar dari *World Trade Organization* (WTO).<sup>31</sup>

Tujuan RCEP adalah untuk melengkapi WTO dengan menggabungkan perjanjian yang sudah ada dan memasukkan peraturan tambahan di bidang tertentu. RCEP dibentuk karena beberapa hasil ASEAN+1 belum tercapai karena kerja sama di wilayah Asia Tenggara tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Fokus RCEP adalah untuk mencapai liberalisasi perdagangan total. Negosiasi yang dibahas dalam RCEP dapat mencapai liberalisasi tarif yang lebih besar daripada ASEAN+1.<sup>32</sup>

Keterlibatan RCEP didorong oleh alasan ketiga, yaitu rencananya akan membuat ASEAN menjadi lebih kuat di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, dijelaskan bahwa negara anggota RCEP adalah tujuan ekspor utama Indonesia. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia ke seluruh anggota RCEP mencapai 60% pada tahun 2017, dengan Amerika Serikat menyumbang 11%, dan negara lain seperti Eropa, Asia, dan Afrika menyumbang 29%.

Tujuan RCEP adalah untuk membuat perjanjian yang saling menguntungkan, modern, komprehensif, dan berkualitas tinggi antara negara-negara yang tergabung. RCEP juga menawarkan fleksibilitas dan ketentuan yang sesuai untuk perlakuan khusus dan berbeda, khususnya untuk Kamboja, Laos,

---

<sup>31</sup> FTACenter.2023. *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Diakses dari <https://ftacenter.kemendag.go.id/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep> pada 10 Januari 2024 pukul 10.00 WITA

Myanmar, dan Vietnam, serta negara-negara berkembang lainnya. Selain itu, RCEP mencakup kerja sama teknis dan pengembangan kapasitas untuk mendukung implementasi komitmen dan memaksimalkan manfaat dari perjanjian ini bagi semua pihak.

Dokumen perjanjian RCEP berjumlah 14.367 halaman yang terdiri dari 20 Bab dan 21 Lampiran Teks Perjanjian, serta 4 Lampiran Komitmen Perjanjian. Sementara itu, komitmen masing-masing anggota RCEP terkait akses pasar Barang, Jasa, Investasi, dan Pergerakan Manusia (*Goods, Services, Investment dan Movement of Natural Persons/MNP*) tertuang dalam empat Lampiran Perjanjian RCEP tersebut, yaitu:

1. Daftar Komitmen Tarif (*Schedules of Tariff Commitments*);
2. Daftar Komitmen Khusus untuk Jasa (*Schedules of Specific Commitments on Services*);
3. Daftar Syarat dan Peraturan Penyesuaian untuk Jasa dan Investasi (*Schedules of Reservations and NonConforming Measures for Services and Investment*); dan
4. Daftar Komitmen Khusus dan Pergerakan Sementara Manusia (*Schedules of Specific Commitments on Temporary Movement of Natural Persons*).

Adapun RCEP memiliki aturan-aturan fasilitatif diantaranya:

1. *Unified Rules of Rules of Origin (RoO)* menggabungkan aturan keterangan asal untuk mendapatkan tarif preferensi dari empat ASEAN+1 FTAs, dengan satu jenis SKA dapat digunakan untuk seluruh kawasan

kepastian aturan bagi pelaku usaha yang ekspor ke berbagai negara anggota RCEP;

2. Aturan RoO dan kepabeanan menjadi lebih mudah, karena barang yang rusak dapat melalui proses kepabeanan dalam waktu enam jam sejak kedatangan, dan proses kepabeanan menjadi lebih sederhana dan lebih cepat, dan

3. Ketentuan Akumulasi: fasilitas ini mempertimbangkan bahan baku dan intermediate yang berasal dari negara anggota RCEP lain sebagai negara yang memproses. Ini mempermudah memperoleh tarif preferensi dan mendorong rantai pasokan regional karena akses bahan baku menjadi lebih terbuka dan mudah, sehingga negara peserta RCEP lebih suka memproduksi dan menjual produk di wilayah RCEP.

RCEP terdiri dari 20 Bab dan mengatur berbagai wilayah yang belum diatur oleh perjanjian FTA antara ASEAN dan mitranya. RCEP mengatur perdagangan barang (*trade in goods*). Ini termasuk aturan asal, bea cukai dan fasilitasi dagang, sanitasi dan fitosanitasi, standar, pengaturan teknis, dan prosedur asesmen kesesuaian. RCEP juga mencakup solusi perdagangan. RCEP juga mengatur jasa perdagangan yang mencakup perpindahan sementara antara manusia dan subjek hukum natural (*natural person*), serta jasa keuangan, telekomunikasi, dan jasa profesional lainnya. Selain itu, ada peraturan yang berkaitan dengan investasi, hak kekayaan intelektual, e-commerce, persaingan

bisnis, usaha mikro, kecil, dan menengah, pengadaan publik, dan bidang legal dan institusional seperti penyelesaian sengketa.

Perjanjian RCEP memberikan kebebasan perdagangan dalam hal akses pasar serta memiliki cakupan yang luas terkait investasi. Tujuan RCEP adalah untuk meningkatkan liberalisasi perdagangan barang antara negara-negara anggota melalui, antara lain, langkah-langkah berikut: Pertama, selama dua puluh tahun, setiap negara anggota harus menetapkan komitmen untuk mengurangi bea masuk sebesar 92% dari barang asal. Khususnya, jadwal bea untuk mitra dagang yang ada mungkin dimulai dengan tarif yang lebih rendah karena telah dikurangi oleh perjanjian perdagangan yang ada.<sup>33</sup>

Kedua, RCEP melarang impor atau ekspor antar negara anggota dengan tindakan nontarif kecuali sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian WTO atau RCEP. Untuk mencegah hambatan perdagangan yang tidak perlu, pengimpor dan pengeksportir juga diminta untuk bersikap jujur tentang tindakan non-tarif yang diizinkan. Ketika pembatasan kuantitatif diterapkan melalui pembatasan kuota atau perizinan, biasanya akan dihapuskan.

Ketiga, RCEP menetapkan aturan untuk memudahkan perdagangan dan transparansi. Ini termasuk penetapan lanjutan, bea cukai yang cepat dan izin pengiriman ekspres yang dipercepat, transparansi dalam impor, ekspor, dan perizinan, dan prosedur untuk eksportir yang disetujui untuk membuat deklarasi

---

<sup>33</sup> Fandy Ahmad Setia Budi, Afrimadona, Sindy Yulia Putri. 2023. *Implementasi Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership Terhadap Perdagangan Indonesia dan Negara Anggota Tahun 2020-2023*. Vol. 04 No. 02 Hlm. 136-137

asal. RCEP juga membangun infrastruktur TI untuk membantu kepastian dan membantu operator resmi melakukan perdagangan.

Keempat, RCEP menetapkan Rules of Origin (RoO) yang terperinci untuk bisnis yang ingin memenuhi syarat barang yang berasal dari tujuan RCEP. Aturan kumulasi, yang memungkinkan barang yang berasal dari satu negara anggota digunakan dalam produksi produk baru di negara anggota lain untuk dianggap berasal dari negara anggota kedua, memungkinkan peningkatan kemampuan untuk berbagi sumber daya di antara 15 negara anggota.

### **3.2 RCEP dalam Kerangka Struktur Ekonomi Global**

Perjanjian perdagangan memiliki peran penting dalam dinamika ekonomi global. Perjanjian tersebut membantu memfasilitasi aliran barang dan jasa antar negara, meningkatkan kerjasama ekonomi, dan mengurangi hambatan perdagangan. Dengan adanya perjanjian perdagangan dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta insentif bagi inovasi dan efisiensi produksi. Namun dampak yang ditimbulkan dari perjanjian perdagangan dapat bervariasi tergantung pada implementasi dan kepatuhan dari masing-masing negara.

Kerjasama ekonomi regional merupakan strategi krusial dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Ini memungkinkan negara-negara anggota untuk meningkatkan daya saing global, memperkuat stabilitas politik dan keamanan regional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan memperkuat daya saing global, negara-negara anggota dapat bersama-sama mencapai keberlanjutan ekonomi yang lebih baik dalam era globalisasi.

Strategi kerja sama ekonomi regional melibatkan peningkatan koordinasi dengan organisasi internasional dan mitra dagang, serta mengurangi hambatan non-tarif seperti peraturan perdagangan dan hambatan investasi. Misalnya adalah ASEAN, yang didirikan pada 8 Agustus 1967. ASEAN bertujuan untuk memajukan perekonomian di negara-negara anggotanya dan memperkuat hubungan persahabatan di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks global, kerjasama ekonomi regional menjadi fondasi yang kuat bagi negara-negara anggota untuk bersama-sama menghadapi perubahan ekonomi dan meningkatkan daya saing di pasar global dengan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung.

Di tengah ketidakpastian global, negara-negara di Asia segera meratifikasi perjanjian perdagangan yang telah lama dirundingkan sebelumnya. Dengan membawa kepentingan masing-masing, negara-negara perunding RCEP segera meratifikasi perjanjian tersebut pada tahun 2020. Hadirnya pandemi Covid-19, membuat perjanjian ini semakin penting untuk segera diselesaikan. Adanya ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan China, membuat China tak kalah menggebu untuk segera menyelesaikan perjanjian RCEP.

Ditetapkannya RCEP pada tahun 2020, yang melibatkan China sebagai pemain utama, berbeda dengan nasib perjanjian TPP (*Trans Pacific Partnership*) yang dipromosikan Presiden Obama. Pada tahun 2017, Amerika Serikat, sebagai pihak penting dalam kesepakatan, menarik diri darinya saat Presiden Donald



Trump menjabat di Gedung Putih. Shintaro Hamanaka pernah melakukan diskusi perbandingan antara dua blok perdagangan: *Trans-Pacific Partnership versus Comprehensive Economic Partnership, Control of Membership, and Agenda Setting (2014)*.<sup>34</sup> Salah satu kesimpulan diskusinya adalah bahwa pembentukan blok perdagangan seperti RCEP dan TPP dapat dianggap sebagai persaingan antara para pemain utama, seperti China dan Amerika Serikat, untuk mengambil kendali atas keanggotaan dan menetapkan agenda untuk masalah tertentu. Dengan masuknya dua sekutu Amerika Serikat, Australia dan Jepang, ke dalam RCEP, aktivitas blok perdagangan ASEAN plus 5 semakin menarik, terutama karena kehadiran China telah membantu proses kesepakatan perdagangan internasional terbesar ini.

Kelima negara mitra RCEP memiliki kepentingan yang berbeda. Karena sebagian besar mitra dagang terbesar mereka adalah anggota RCEP, Australia dan Selandia Baru melihat kesepakatan ini sebagai peluang untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Namun, sebagai kekuatan ekonomi terbesar, China ingin memperkuat hubungan ekonomi dengan ASEAN dan menegaskan dominasinya di Asia. Jepang berharap dapat mengambil posisi penting dalam RCEP untuk melindungi pengaruh China, dan Korea Selatan, sebagai anggota RCEP dapat berfungsi sebagai penengah antara China dan Jepang dalam hal preferensi perdagangan mereka. Tantangan yang dihadapi, bagaimanapun, termasuk perbedaan kapasitas dan kepentingan ekonomi antara negara-negara

---

<sup>34</sup> Detik.com. 2022. *RCEP, Tiongkok dan Peran Indonesia* diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-5915969/rcep-tiongkok-dan-peran-indonesia> pada 11 Maret 2024 pukul 11.00 WITA

mitra dan ASEAN, serta kebutuhan akan kerja sama dan bantuan teknis untuk mengatasi kesenjangan pembangunan.<sup>35</sup>

Untuk membantu negara-negara berkembang mengejar ketertinggalan dunia, RCEP bertujuan untuk menurunkan tarif, membuka perdagangan jasa, dan mendorong investasi. Dengan memungkinkan ekspor produk ke mana pun di dalam blok tanpa memenuhi persyaratan yang berbeda untuk setiap negara, RCEP diharapkan dapat membantu perusahaan mengurangi biaya dan waktu. Kekayaan intelektual juga akan menjadi bagian dari perjanjian RCEP ini, tetapi hak tenaga kerja dan perlindungan lingkungan tidak akan menjadi bagian darinya. Beberapa ketentuan tentang perdagangan digital masih belum disetujui sepenuhnya oleh negara-negara yang tergabung dalam RCEP ini.<sup>36</sup>

Sekretaris ASEAN menyatakan bahwa akan ada banyak keuntungan dari perjanjian ini. Pertama-tama, RCEP diharapkan dapat membantu bisnis dan penduduk di negara ASEAN dalam pemulihan ekonomi yang cepat dan tangguh. Dengan menghapus tarif dan kuota di lebih dari 65% barang yang diperdagangkan, Perjanjian RCEP akan meningkatkan akses pasar dan membuat bisnis lebih dapat diprediksi dengan aturan asal yang sama (*Common Rules Of Origin*) dan regulasi yang jelas setelah diberlakukan. Hal ini akan mendorong

---

<sup>35</sup> Eva Novi Karina, Vinie Puspaningrum. 2014. *Diplomasi Ekonomi Indonesia antara Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Trans Pasific Partnership (TPP)*. Yogyakarta: Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM. Hlm 34-35

<sup>36</sup> Mochamad Rifki Maulana. 2021. *Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP)*. Vol.5 No.1 Hlm 119

bisnis untuk berinvestasi lebih banyak di sektor ini, termasuk membangun rantai pasokan dan layanan, sehingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja.<sup>37</sup>

*The Peterson Institute for International Economics* mengestimasi bahwa perjanjian RCEP memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan negara global sampai \$186 milyar per tahun pada tahun 2030 dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing negara menjadi 0,2%. RCEP memiliki kemampuan untuk meningkatkan akses ke dana *Belt and Road Initiative* (BRI) China dengan memperkuat jaringan komunikasi, energi, dan transportasi. Selain itu, aturan asal RCEP yang menguntungkan akan menarik investasi asing.<sup>38</sup>

RCEP adalah kemenangan diplomasi dari kekuatan menengah ASEAN. Meskipun nilai perjanjian perdagangan Asia Timur yang besar telah lama diakui, kedua ekonomi terbesar di Asia Timur, China dan Jepang, tidak dapat disebut secara politik sebagai penciptanya. Kebuntuan tersebut diselesaikan pada tahun 2012 dengan perjanjian ASEAN—yang memiliki India, Australia, dan Selandia Baru sebagai anggota—dan menempatkan ASEAN sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk merundingkannya. RCEP tidak mungkin dimulai tanpa "sentralitas ASEAN".

Menurut Perdana Menteri China Li Keqiang, penandatanganan RCEP merupakan tonggak penting bagi kerja sama regional di Asia Timur serta multilateralisme dan perdagangan bebas. Menurut Perdana Menteri Vietnam

---

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Ibid

Nguyen Xuan Phuc, kesimpulan dari negosiasi RCEP akan mengirimkan pesan yang kuat tentang peran penting ASEAN dalam mendukung sistem perdagangan multilateral, membantu menciptakan struktur perdagangan baru di wilayah tersebut, memfasilitasi perdagangan secara berkelanjutan, mengembangkan rantai pasokan yang terganggu, dan mendukung pemulihan pasca pandemi.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Menteri Perindustrian dan Perdagangan Internasional Malaysia Mohamed Azmin Ali, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akan melihat penandatanganan RCEP sebagai bukti upaya untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral dan menegakkan agenda pembangunan. Menurut Simon Birmingham, Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia. Pada saat perdagangan global dilanda ketidakpastian, RCEP adalah perjanjian yang sangat simbolis.<sup>40</sup>

### **3.3 Implementasi RCEP di Indonesia**

Indonesia telah memainkan peran penting dalam negosiasi pembentukan RCEP karena menjadi satu-satunya negara yang mencetuskan, inisiator, dan koordinator perjanjian tersebut, baik dalam kancah ASEAN maupun dengan negara mitra sejak awal perundingan. Ini harus diakui, terutama bagi Tim Perunding Indonesia, yang telah bekerja keras untuk mendukung kepentingan ekonomi Indonesia.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2019. *Menilik Geliat Perkembangan RCEP: Indonesia sebagai Pencetus dan Negara Koordinator RCEP*. Diakses dari

Pada tanggal 15 November 2020, Indonesia menandatangani Perjanjian RCEP di Istana Bogor. Penandatanganan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Agus Suparmanto di sela-sela KTT ASEAN ke-37. Pemerintah menyatakan ada empat manfaat perjanjian ini bagi Indonesia. Manfaat pertama adalah mendorong *regional production network* dan *regional value chains*. Manfaat kedua adalah meningkatkan akses pasar produk ekspor Indonesia. Manfaat ketiga adalah meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan. Adapun yang keempat adalah meningkatkan aliran investasi langsung (FDI).<sup>42</sup>

Dengan adanya Perjanjian RCEP, Indonesia mendapatkan kepastian dan keseragaman aturan perdagangan, peningkatan kegiatan penanaman modal atau investasi, peningkatan akses pasar barang dan jasa Indonesia, peningkatan kapasitas dan peran UMKM, dan peningkatan transformasi ekonomi digital. Namun, terdapat tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia dengan adanya persaingan yang tinggi dalam memasuki pasar negara mitra dan dalam negeri, sehingga menciptakan kondisi pasar yang sangat kompetitif. Hal ini juga akan mengakibatkan adanya reformasi kebijakan yang masif.<sup>43</sup>

Pengimplementasian RCEP sebagai mega FTA diharapkan akan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Keuntungan tersebut adalah karena

---

<https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/menilik-geliat-perkembangan-sebagai-pencetus-dan-negara-koordinator-rcep> diakses pada 12 maret 2024 pukul 10.00 WITA

<sup>42</sup> Mochamad Rifki Maulana. 2021. *Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP)*. Vol.5 No.1 Hlm 119

<sup>43</sup> Fandy Ahmad Setia Budi, Afrimadona, Sindy Yulia Putri. 2023. *Implementasi Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership Terhadap Perdagangan Indonesia dan Negara Anggota Tahun 2020-2023*. Vol. 04 No. 02 Hlm. 132

peningkatan GDP melalui perjanjian tersebut dengan angka senilai Rp38,33 triliun atau sebesar 0,07 persen. Tidak hanya itu, pada tahun 2045 dalam FDI juga terdapat keuntungan setara Rp23,35 triliun atau 0,13 persen. Hal tersebut diungkapkan karena dengan adanya kepastian dan keseragaman aturan perdagangan dapat mendorong peningkatan akses pasar ekspor terhadap barang dan jasa, peningkatan serta pemberdayaan ekspor UMKM, juga memperkuat investasi.<sup>44</sup>

BPS melaporkan, nilai ekspor Indonesia ke negara RCEP sebesar US\$ 91,43 miliar pada 2020 atau 55,54% dari total ekspor nasional. Jumlah tersebut turun 4,2% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US\$ 95,4 miliar. Penurunan ini merupakan dampak dari pandemi yang menghambat aktivitas perekonomian. Sepanjang 2015 hingga 2020, rekor nilai ekspor Indonesia ke negara-negara RCEP terjadi pada 2018, yakni mencapai US\$ 101,3 miliar atau 56,31% dari total ekspor nasional. Sementara, nilai ekspor terendah terjadi pada 2016, yaitu sebesar US\$ 77,2 miliar atau 53,23% dari total ekspor.<sup>45</sup>

Total perdagangan Indonesia dengan 14 negara RCEP pada tahun 2021 sebesar US\$ 263,2 miliar, dengan ekspor senilai US\$ 121,45 miliar atau sebesar 55,40 persen dari total ekspor Indonesia ke dunia dan impor senilai US\$ 118,00 miliar atau sebesar 69,14 persen total impor nonmigas Indonesia dari dunia. Adapun investasi yang masuk sebesar 59,63 persen berasal dari negara anggota

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid, Hlm. 138*

RCEP yaitu Singapura, China, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia sebagai investor utama.<sup>46</sup>

Meskipun RCEP adalah FTA berskala besar, perjanjian ini tidak menghilangkan perjanjian lain yang sudah ada. Beriringan dengan RCEP, FTA lain yang telah berjalan di antara negara peserta juga akan berlaku. Oleh karena itu, pelaku usaha dapat memilih FTA mana yang akan digunakan berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti tarif dan peraturan asal (RoO) yang berlaku. Selain itu, pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, menyusun aturan terkait tarif preferensi dan tata laksana pengenaan bea masuk untuk menanggapi pelaksanaan RCEP di Indonesia.<sup>47</sup>

Data dari kementerian perdagangan menunjukkan bahwa pelaksanaan RCEP mengurangi tarif perdagangan rata-rata untuk sekitar 92 persen barang yang diperdagangkan di antara para pihak RCEP. Kemudian, membuka pasar preferensial tambahan untuk barang tertentu, seperti plastik, bahan bakar mineral, produk kimia, makanan dan minuman olahan, dan sebagainya. Selain itu, RCEP menyederhanakan proses kepabeanan, yang memungkinkan pengeluaran barang yang cepat dan administrasi yang efisien. Misalnya, barang yang mudah rusak dapat dilepaskan dalam waktu 6 jam setelah kedatangan.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2023. *Perluas Integrasi Perdagangan, Indonesia Implementasikan Perjanjian Perdagangan di Awal Tahun 2023*. Diakses dari <https://www.beacukai.go.id/berita/perluas-integrasi-perdagangan-indonesia-implementasikan-perjanjian-perdagangan-di-awal-tahun-2023.html> pada 10 Maret 2024 pukul 10.30 WITA

<sup>48</sup> Fandy Ahmad Setia Budi, Afrimadona, Sindy Yulia Putri. 2023. *Implementasi Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership Terhadap Perdagangan Indonesia dan Negara Anggota Tahun 2020-2023*. Vol. 04 No. 02 Hlm. 139

Di tahun 2023, RCEP dilaksanakan seiring dengan inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan aktivitas ekspor dan impor. Menurut Kemenkeu, ekspor Indonesia terus menunjukkan kinerja positif pada November 2022, dengan nilai ekspor mencapai 24,12 miliar dolar AS, atau tumbuh 5,58 persen dibandingkan periode sebelumnya, dan impor mencapai 18,96 miliar dolar AS. Perkembangan ini membuat neraca perdagangan mencatat surplus sebesar 5,16 miliar dolar AS, melanjutkan tren surplus selama 31 bulan berturut-turut.<sup>49</sup>

Secara keseluruhan, surplus neraca perdagangan dari Januari hingga November 2022 mencapai 50,59 miliar USD, lebih besar dari surplus periode yang sama tahun 2021 sebesar 34,3 miliar USD. Sementara itu, penerimaan bea keluar mencapai 39,8 miliar USD, atau 108,5% dari target. Peningkatan volume ekspor dan harga komoditi, terutama produk kelapa sawit serta mineral dan batu bara (minerba), berkontribusi pada kinerja ini. Dengan pengeluaran bea masuk dan bea keluar, target penerimaan bea cukai 2022 sebesar Rp 317,8 triliun, atau sekitar 106,3% dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, telah melampaui.<sup>50</sup>

Seperti yang diketahui, investasi luar negeri memiliki efek ganda pada pertumbuhan ekspor, jadi kemitraan investasi dalam RCEP ini dapat memungkinkan industri di antara anggota RCEP untuk berinvestasi di luar negeri. Salah satu komponen utama pelaksanaan RCEP ini adalah investasi. Akibatnya,

---

<sup>49</sup> *ibid*

<sup>50</sup> Antara. 2022. Kemenkeu: Perdagangan RI pada November lanjutkan tren surplus 1 bulan. Diakses dari <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/menilik-geliat-perkembangan-rcep-indonesia-sebagai-pencetus-dan-negara-koordinator-rcep> pada 11 Maret 2024 pukul 10.30 WITA



Indonesia harus melihat peluang dalam memanfaatkan RCEP, antara lain, melalui kerangka undang-undang yang padu antara pemerintah dan swasta dan kemampuan untuk menarik investasi untuk bergabung dengan *global value chain*.<sup>51</sup>

Sebesar 72% aliran investasi asing yang masuk ke Indonesia berasal dari negara anggota RCEP.<sup>52</sup> Melalui RCEP, Indonesia juga akan mendapatkan akses pasar tambahan dari Cina, Korea dan Jepang untuk produk-produk di sektor perkebunan, pertanian, otomotif, elektronik, kimia, makanan, minuman, mesin dan kehutanan. Adapun negara RCEP yang memberikan investasi terbesar di Indonesia adalah Singapura dan kemudian disusul oleh China.

Indonesia perlu mempersiapkan diri lebih baik untuk menerapkan RCEP, terutama untuk produk makanan dan minuman, yang masih menghadapi defisit perdagangan. Indonesia menjadi pasar terbesar kedua setelah China. Untuk memastikan bahwa Indonesia bukan hanya negara tujuan ekspor peserta RCEP, daya saing produk makanan dan minuman harus ditingkatkan.<sup>53</sup>

Jika melihat Indonesia-Australia CEPA, ekspor makanan dan minuman ada kenaikan, tetapi impor naik lebih tinggi. Indonesia perlu persiapan lebih besar lagi dan bagaimana meningkatkan daya saing kita. Kehadiran kemitraan

---

<sup>51</sup> Antara. 2023. *BSKLN mulai tinjauan kebijakan RCEP untuk peningkatan investasi*. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/3548181/bskln-mulai-tinjauan-kebijakan-rcep-untuk-peningkatan-investasi> pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 10.00 WITA

<sup>52</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2021. *Pemanfaatan Perjanjian untuk Peningkatan Daya Saing dan Menarik Investasi*. Diakses dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3574/pemanfaatan-perjanjian-rcep-untuk-peningkatan-daya-saing-dan-menarik-investasi> 11 Maret 2024 pukul 10.00 WITA

<sup>53</sup> Iim Fhatimah Timorria. *Bisnis Indonesia*. 2021. *Mengebut Persiapan Indonesia Menuju RCEP Awal 2022*. Diakses dari <https://bisnisindonesia.id/article/mengebut-persiapan-indonesia-menuju-rcep-awal-2022> pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 10.45 WITA

global. RCEP menciptakan platform untuk kerja sama ekonomi yang lebih luas di kawasan Asia Pasifik. Namun, dalam praktiknya, RCEP beresiko memperkuat posisi negara-negara yang lebih kuat secara ekonomi, sementara meningkatkan ketergantungan bagi negara-negara yang lebih lemah dalam kesepakatan ini.

Dalam konsep kolonialisme baru menyoroti bahwa negara-negara maju mendominasi negara berkembang dalam interaksinya. Dalam konteks RCEP negara-negara maju tersebut yaitu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di kawasan ini seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan Singapura. Sementara Indonesia masih berada dibawah jika dilihat dari kemajuan ekonominya.

Ditinjau dari sudut pandang neokolonialisme RCEP memberikan kekuatan besar kepada negara-negara maju dalam menentukan aturan perdagangan di kawasan tersebut, sementara negara-negara berkembang cenderung memiliki keterbatasan dalam negosiasi. Ini dapat menguntungkan perusahaan dari negara-negara maju, yang memiliki akses lebih besar terhadap pasar dan sumber daya di negara-negara anggota RCEP.

China menjadi negara yang paling mendominasi dalam perjanjian ini. China memiliki kepentingan khusus untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik untuk menyaingi Amerika Serikat. China dianggap sebagai negara paling diuntungkan dari RCEP karena memungkinkan China untuk mengimplementasikan program *Belt Road Initiative* (BRI), rencana

tentang dampak ekonomi, sosial, dan politik dari perjanjian perdagangan seperti RCEP terhadap Indonesia, serta menyediakan rekomendasi kebijakan yang sesuai untuk memperbaiki kondisi yang mungkin merugikan bagi negara. Dengan memberikan saran-saran ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menghadapi tantangan dan peluang yang terkait dengan implementasi perjanjian perdagangan multilateral seperti RCEP bagi Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Sumber Buku:

- Afandi, S. A., Muslim A., Rizki E. 2022. *Pengantar Teori Pembangunan*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.
- Karina, E. N. Puspaningrum, V. 2014. *Diplomasi Ekonomi Indonesia antara Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Trans PasifiC Partnership (TPP)*. Yogyakarta: Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2023. *Pemanfaatan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) untuk Peningkatan Perdagangan dengan Lima Negara RCEP Non-ASEAN*. DKI Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Miftakhuddin.(2019). *Kolonialisme Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni*. Sukabumi: CV Jejak.
- Nkrumah, K. 1966. *Neo-colonialism The Last Stage of Imperealism*. London: Thomas Nelson & Sons, Ltd.

##### Sumber Jurnal:

- Fandy Ahmad Setia Budi, Afrimadona, Sindy Yulia Putri. 2023. *Implementasi Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership Terhadap Perdagangan Indonesia dan Negara Anggota Tahun 2020-2023*. Vol. 04 No. 02

- Maulana, M. R. (2021). *Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) Dan Pengaruhnya Untuk Indonesia*. Vol. 5 No. 1, hlm. 118-127
- Pratama, M. F., dkk. (2022). *Motif dan Kepentingan China dalam Pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol. 6. No.1 hlm 1833-1846
- Utama, A. P. *Implementasi Teori Dependensi Studi Kasus : Kebijakan Belt And Road Initiative Tiongkok Khususnya Di Kawasan Afrika Timur*. Vol. 3 No. 2, hlm 47-65
- Yunarwanto. (2019). *Dampak Keikutsertaan Indonesia di dalam Regional Comprehensive Economic Partnership terhadap Volume Perdagangan-Bukti Gravity Model*. Kajian Ekonomi dan Keuangan. Vol.3, 151-159
- Budi, F.A.S dkk. (2023). *Implementasi Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership Terhadap Perdagangan Indonesia dan Negara Anggota Tahun 2020-2023*. Vol.04. No.2

#### **Sumber Skripsi:**

- Putri, G. (2023). *Analisis Dampak Regional Comprehensive Economic Partnership terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2020-2023*. Universitas Islam Indonesia.

#### **Sumber Website:**

- Annur, C.M. 2023. *Investasi Tiongkok di Indonesia Melonjak 63% pada 2022*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/11/investasi-tiongkok-di-indonesia-melonjak-63-pada-2022> pada 1 Mei 2024
- Antara News. 2023. *Jumhur Hidayat: Kerusakan di Morowali Utara akibat ketidakadilan yang dirasakan langsung pekerja lokal*. Diakses dari <https://megapolitan.antaranews.com/berita/227181/jumhur-hidayat-kerusakan-di-morowali-utara-akibat-ketidakadilan-yang-dirasakan-langsung-pekerja-lokal> pada 20 Maret 2024
- Antara. 2022. *Kemenkeu: Perdagangan RI pada November lanjutkan tren surplus 1 bulan*. Diakses dari <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/menilik-geliat-perkembangan-rcep-indonesia-sebagai-pencetus-dan-negara-koordinator-rcep> pada 11 Maret 2024
- Antara. 2023. *BSKLN mulai tinjauan kebijakan RCEP untuk peningkatan investasi*. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/3548181/bskln-mulai-tinjauan-kebijakan-rcep-untuk-peningkatan-investasi> pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 10.00 WITA
- Aprilia, Z. 2023. *Benarkah Indonesia masuk jebakan utang China? Ini faktanya*. Diakses dari

- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230416115143-4-430322/benarkah-indonesia-masuk-jebakan-utang-china-ini-faktanya-pada-1-Mei-2024>
- Auria, F., Gischa, S. (2023). *Teori Ketergantungan dalam Hubungan Internasional*. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/23/140000769/teori-ketergantungan-dalam-hubungan-internasional?page=all> pada tanggal 25 September 2023
- BPBatam.2023. *Singapura Masih Dominasi Investasi Asing di Kota Batam*. Diakses dari <https://bpbatam.go.id/singapura-masih-dominasi-investasi-asing-di-kota-batam/> pada 1 Mei 2024
- Britannica. *Neo-colonialism*. Diakses dari <https://www.britannica.com/topic/neocolonialism> pada tanggal 5 September 2023
- CNBC. 2023. *Nilai perdagangan RI China tembus RP 2041 Triliun*. Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20231019071141-4-481787/top-nilai-perdagangan-ri-china-tembus-rp-2041-triliun/amp> pada 1 Mei 2024
- CNBCIndonesia. *Ini 4 Manfaat Perjanjian RCEP bagi Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201130104516-4-205605/ini-4-manfaat-perjanjian-rcep-bagi-indonesia> pada 2 Februari 2024
- Depublish store. (2023). *Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data, dan Contoh di Penelitian*. Diakses dari <https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian/> pada tanggal 1 Oktober 2023
- Depublish Store. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Definifi, Jenis, Karakteristiknya*. Diakses dari <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/> pada tanggal 1 Oktober 2023
- Detik.com. 2022. *RCEP, Tiongkok dan Peran Indonesia*. Diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-5915969/rcep-tiongkok-dan-peran-indonesia> pada 11 Maret 2024
- DosenSosiologi.com. (2023). *Pengertian Neokolonialisme, Macam, Tujuan, Dampak dan Contohnya*. Diakses dari <https://dosensosiologi.com/pengertian-neokolonialisme/> pada tanggal 1 Oktober 2023
- FTACenter. (2023). *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Diakses dari <https://ftacenter.kemendag.go.id/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep#:~:text=Pada%2015%20November%2020%2C%20perjanjian,dengan%20Vietnam%20sebagai%20tuan%20rumah> pada tanggal 1 September 2023
- Internet Encyclopedia of Philosophy. Neocolonialism*. Diakses dari <https://iep.utm.edu/neocolon/> pada tanggal 20 September 2023
- Kemendag.2022. *Pertemuan Bilateral Mendag RI dengan Menteri Ekonomi Jepang*. Diakses dari

